

ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI SEKTOR PUBLIK

Sri Wahyuni¹, Isra Maulina²

sri.wahyuuni24@gmail.com

isramaulina@iainlhokseumawe.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstrak

Good governance merupakan konsep penting dalam sektor publik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi. Akuntansi memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi yang andal sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi dalam mewujudkan good governance melalui kajian literatur dan pendekatan normatif-kritis. Penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menggali kontribusi teori-teori seperti Agensi, Legitimasi, Institusional, Stewardship, dan Teori Sistem terhadap praktik akuntansi sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya alat teknis pelaporan, tetapi juga merupakan instrumen legitimasi, kontrol sosial, dan pembentuk budaya akuntabilitas. Penguatan kapasitas SDM, reformasi birokrasi, dan penerapan teknologi informasi menjadi faktor penentu optimalisasi fungsi akuntansi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: akuntansi publik, good governance, teori akuntansi, studi pustaka, tata kelola pemerintahan

Abstract

Good governance is an essential concept in the public sector that emphasizes transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and public participation. Accounting plays a central role in providing reliable information as the basis for accountability and decision-making. This article aims to analyze the role of accounting in promoting good governance through literature review and a normative-critical approach. The study adopts a library research method by exploring the contributions of theories such as Agency, Legitimacy, Institutional, Stewardship, and Systems Theory to the practice of public sector accounting. The findings indicate that accounting is not merely a technical reporting tool, but also serves as an instrument of legitimacy, social control, and a driver of accountability culture. Strengthening human resource capacity, bureaucratic reform, and the implementation of information technology are critical factors in optimizing the function of accounting to support good governance in the public sector.

Keywords: Public Accounting, Good Governance, Accounting Theories, Literature Review, Public Governance

A. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sektor publik semakin mengemuka, baik dari masyarakat maupun komunitas internasional. Fenomena ini muncul sebagai respons atas berbagai kasus penyalahgunaan anggaran publik, lemahnya pengawasan, serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, good governance menjadi sebuah prinsip dasar yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Good governance bukan hanya menjadi jargon normatif, tetapi telah menjelma menjadi kerangka kerja institusional yang harus diwujudkan secara nyata dalam tata kelola sektor publik (Indura et al., 2019).

Prinsip-prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi (UNDP, 1997). Dalam implementasinya, prinsip-prinsip ini sangat memerlukan dukungan dari sistem informasi yang andal, dan salah satu elemen kuncinya adalah sistem akuntansi publik. Akuntansi memainkan peran strategis dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, terutama melalui penyajian informasi keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018). Tanpa dukungan sistem akuntansi yang baik, upaya mewujudkan good governance hanya akan menjadi retorika administratif belaka.

Peran akuntansi dalam sektor publik menjadi semakin penting ketika birokrasi dihadapkan pada tekanan reformasi birokrasi dan penguatan sistem keuangan daerah. Pemerintah daerah, misalnya, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan menyampaikannya kepada publik serta lembaga pengawas. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah, dan pada saat yang sama lembaga pengawas dapat menjalankan fungsinya secara objektif. Dengan demikian, akuntansi berperan sebagai alat pengendali dan penjamin integritas dalam pengelolaan keuangan negara (Susanto & Meiryani, 2019).

Lebih jauh, akuntansi publik tidak hanya mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas yang merupakan fondasi utama dari good governance. Oleh karena itu, studi teoritis terhadap hubungan antara akuntansi dan good governance menjadi sangat relevan untuk dibahas secara mendalam. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman

yang komprehensif tentang bagaimana akuntansi mampu menjadi instrumen penegak prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih baik dalam pengembangan sistem akuntansi di sektor publik (Putra et al., 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas informasi akuntansi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Sebuah studi oleh Purwanto & Sudirman (2021) menemukan bahwa akuntansi berbasis akrual telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat pula kendala implementatif seperti kurangnya pemahaman SDM, lemahnya infrastruktur teknologi informasi, dan resistensi terhadap perubahan, yang menyebabkan peran akuntansi belum optimal dalam mendukung good governance. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dengan realitas implementasi yang perlu dianalisis lebih dalam.

Di sisi lain, pendekatan teoritis terhadap peran akuntansi dalam mendukung good governance dapat dijelaskan melalui beberapa teori, seperti teori agensi, teori stewardship, dan teori institusional. Teori agensi, misalnya, menekankan pentingnya akuntansi sebagai mekanisme pengendalian antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah). Dalam konteks ini, laporan keuangan publik menjadi alat evaluasi kinerja dan akuntabilitas agen kepada prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, teori institusional memberikan pemahaman bahwa praktik akuntansi di sektor publik tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh tekanan normatif dan regulatif dari lingkungan eksternal (Scott, 2008).

Dengan memperhatikan kerangka teoritis dan temuan empiris yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis bagaimana akuntansi mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip good governance di sektor publik. Kajian ini tidak hanya penting untuk memperkaya literatur akuntansi publik, tetapi juga sebagai kontribusi akademik dalam mendorong penguatan institusi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti: Bagaimana akuntansi dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung good governance? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Dan teori manakah yang paling relevan untuk menjelaskan peran strategis akuntansi dalam konteks ini?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (literature review). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk melakukan telaah kritis terhadap berbagai literatur yang relevan guna memahami peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di sektor publik. Penelitian jenis ini tidak berfokus pada pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan pada eksplorasi dan sintesis pengetahuan yang telah ada dari berbagai sumber akademik dan praktis.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku teks teori akuntansi publik, artikel jurnal akademik terindeks nasional maupun internasional yang relevan dengan tema good governance dan akuntansi sektor publik, serta dokumen resmi pemerintah seperti regulasi perundang-undangan (contohnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). Di samping itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan tahunan lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyediakan informasi penting mengenai implementasi akuntansi dan tata kelola keuangan di berbagai instansi publik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam berbagai referensi yang dikaji. Selain itu, digunakan juga pendekatan refleksi teoritis, yang memungkinkan penulis untuk mengkaitkan temuan literatur dengan kerangka teori seperti teori agensi, legitimasi, institusional, stewardship, sistem, dan stakeholder. Untuk memperkuat validitas kajian, pendekatan ini dipadukan dengan analisis normatif-kritis, yaitu menilai kesenjangan antara teori ideal dengan realitas praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, kritis, dan kontekstual mengenai kontribusi akuntansi terhadap perwujudan good governance di sektor publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntansi sebagai Instrumen Transparansi Publik Teori Agensi

Salah satu hasil utama dari kajian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam sektor publik sangat bergantung pada kualitas sistem akuntansi yang diterapkan oleh instansi pemerintah. Informasi keuangan yang disusun secara akuntabel dan berdasarkan standar yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memungkinkan publik untuk menilai kinerja dan penggunaan anggaran oleh entitas pemerintah. Studi oleh Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa akuntansi yang transparan berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Secara teoritis, hasil ini diperkuat oleh teori agensi yang menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat). Ketika laporan keuangan disusun secara jujur dan terbuka, maka hubungan agensinya menjadi sehat karena asimetri informasi dapat ditekan (Jensen & Meckling, 1976).

2. Peran Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang baik memungkinkan penelusuran jejak penggunaan anggaran serta kinerja program. Pemerintah yang menggunakan akuntansi berbasis akrual cenderung lebih mampu menunjukkan beban dan kewajiban secara menyeluruh, yang meningkatkan akuntabilitas keuangan publik (Putra et al., 2020).

Teori *stewardship* digunakan untuk memahami peran akuntansi dalam mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam teori ini, pejabat publik diasumsikan memiliki niat baik untuk mengelola dana publik dan akuntansi menjadi alat untuk menunjukkan itikad tersebut melalui bukti yang terukur.

3. Sistem Pengendalian Internal dan Audit dalam Mendukung Good Governance

Teori ini menjelaskan bagaimana tekanan eksternal (regulasi, norma Studi literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan

pelaksanaan audit yang berbasis risiko sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Fungsi audit, baik internal maupun eksternal, menjadi bagian dari sistem akuntansi yang mendorong efisiensi dan integritas penggunaan anggaran negara. Menurut Susanto dan Meiryani (2019), akuntansi yang dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang kuat mampu mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

Dalam perspektif teori institusional, praktik audit dan pengendalian internal yang baik muncul tidak hanya karena kebutuhan efisiensi, tetapi juga karena adanya tekanan normatif dari lingkungan eksternal seperti regulasi, opini publik, dan tuntutan dari lembaga donor atau lembaga supranasional (Scott, 2008).

D. KESIMPULAN

Hasil kajian teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendorong terwujudnya *good governance* di sektor publik. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sistem informasi yang memungkinkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penyajian laporan keuangan yang andal, tepat waktu, dan berbasis pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum—terutama akuntansi berbasis akrual—pemerintah dapat membangun sistem keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

Transparansi dalam pelaporan keuangan publik menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam konteks ini, akuntansi berperan langsung dalam mendukung prinsip partisipasi dan keterbukaan informasi, dua elemen penting dalam konsep *good governance* menurut UNDP.

Selanjutnya, akuntabilitas keuangan menjadi semakin kuat ketika sistem akuntansi mampu menyediakan informasi yang lengkap mengenai kinerja pemerintah dalam menggunakan dana publik. Dengan kata lain, akuntansi memungkinkan publik menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dengan cara yang efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip *stewardship*, di mana

pejabat publik dipandang sebagai pengelola sumber daya masyarakat dan akuntansi menjadi instrumen untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut.

Selain itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang terstruktur serta praktik audit yang baik dan independen juga memperkuat fungsi akuntansi dalam mengawasi proses keuangan publik. Audit keuangan tidak hanya menjadi alat verifikasi data, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi sistem pengelolaan, mendeteksi penyimpangan, dan merekomendasikan perbaikan sistem. Dalam konteks ini, teori institusional menunjukkan bahwa keberhasilan praktik akuntansi publik tidak hanya bergantung pada kebutuhan teknis, tetapi juga pada tekanan normatif dan regulatif dari lingkungan sosial, politik, dan hukum yang melingkupinya.

Dengan menggabungkan berbagai pendekatan teoritis—terutama teori agensi, stewardship, dan institusional—dapat dipahami bahwa akuntansi berperan sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Akuntansi mendukung terciptanya mekanisme checks and balances yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sistem akuntansi sektor publik merupakan strategi kunci dalam mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat institusi negara. Akuntansi bukan sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Asyhad, M., & Handono, W. (2017). Urgensi literasi keuangan syari'ah pada pendidikan dasar. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 13(1).
- Fitriana, N., & Wardani, Y. (2022). Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harun, H., An, Y., & Kamase, H. (2015). Accountability and transparency in Indonesian local government: The role of e-government in public sector reform. *Journal of Public Administration and Governance*, 5(4).
- Indura, A. C., Ahmad, A. A., Suprpto, & Ariantoko. (2019). Analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia. *IJIBE: Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, 1.
- Ismail, M. (2016). *Akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah*. Jakarta: Salemba

Empat.

- Kusnadi, I., & Priyono, A. (2020). Efektivitas implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., & Lubis, A. F. (2019). *Akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulina, I., Yati, L., & A'la, N. (2019). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi kasus: Pada Kantor DPKAD Kota Lhokseumawe). *Jurnal J-Iskan*, 1(2), 53–65.
- Nurhayati, T., & Ratmono, D. (2019). Implementasi akuntansi berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1).
- Prabowo, H. Y., & Sumarsono, R. B. (2021). Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 55–68.
- Sari, D. P., & Wibowo, R. (2023). Transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran daerah: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1).
- Sari, R. N. (2020). *Good governance dan pengelolaan keuangan negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. (2021). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.